

Menavigasi Siklus APBD: Dari Penyusunan Hingga Evaluasi Studi Kasus Desa Bangun Galih Kabupaten Tegal

¹Mario Ferdinandus Tele, ²Wildan Arindra Rahman,
³Victor Pramudita Putra, ⁴Galih Satrio

^{1,2,3,4}UPN "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
60294

e-mail : ¹21013010316@student.upnjatim.ac.id, ²21013010105@student.upnjatim.ac.id,
³21013010084@student.upnjatim.ac.id, ⁴21013010100@student.upnjatim.ac.id

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Bangun Galih, Kabupaten Tegal, dari penyusunan hingga evaluasi. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memahami peran partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan pembangunan daerah mengingat luasnya cakupan wilayah dan padatnya penduduk pada Desa Bangun Galih. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : APBD, Desa Bangun Galih, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan keuangan daerah, Evaluasi

Abstract

This study aims to analyze the cycle of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Bangun Galih Village, Tegal Regency, from planning to evaluation. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and document studies to understand the role of community participation in budget management processes. The findings indicate that while there have been improvements in transparency and accountability, there are still challenges in terms of equitable distribution of regional development given the breadth of regional coverage and dense population. This study recommends enhancing community participation to achieve more effective and responsive regional financial management that meets the needs of the community.

Keywords : APBD, Bangun Galih Village, Community participation, Regional financial management, Evaluation

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah di Indonesia. APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan alat evaluasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam masa jabatan. Dalam konteks Desa Bangun Galih, Kabupaten Tegal, pemahaman yang mendalam mengenai siklus APBD beserta pelaksanaannya merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, dan tujuan dari APBD dapat memberikan sebuah pemerataan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola

keuangan dan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing (Rohman, 2015).

Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat adalah beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APBD. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan APBD karena ini dapat memastikan bahwa anggaran yang dibuat akan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka tentang program-program yang dianggap penting melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, juga dikenal sebagai musrenbang. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan publik yang diambil (Mardiasmo, 2018).

Melihat proses perencanaan dan pelaksanaan siklus APBD secara menyeluruh, dapat diketahui seberapa efektif pengelolaan keuangan suatu pemerintahan daerah dan bagaimana hal itu berdampak pada pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan siklus APBD Desa Bangun Galih dengan memberikan penekanan khusus pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam setiap fase proses tersebut.

Melalui studi kasus ini, diharapkan para pembaca serta para pelaksana pada bidang terkait pemerintahan publik dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana APBD dikelola di tingkat desa serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan pengelolaan APBD di masa mendatang, sehingga para Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan para pejabat lainnya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan pemerataan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Desa (SEKDES) desa Bangun Galih, Kabupaten Tegal. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung seperti laporan siklus APBDes, dan wawancara mendalam secara daring (dalam jaringan) melalui media Google Meet juga telah dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang siklus APBD di Desa Bangun Galih.

Program Unggulan

Desa Bangun Galih telah mengembangkan berbagai program unggulan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program utama adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUDes), yang memungkinkan pengelolaan keuangan desa secara elektronik. Sistem ini tidak hanya meminimalkan kesalahan manual tetapi juga mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, desa ini juga memprioritaskan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung pengembangan UMKM lokal. Upaya ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Dalam perencanaan anggaran, desa memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi RAPBDes. Langkah ini memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi, sehingga program pembangunan yang direncanakan lebih relevan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan yang mencakup semua pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, APBD berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Dalam penyusunannya, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Secara umum, APBD mencakup rencana operasi pemerintah daerah, sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai operasi tersebut, dan batas pengeluaran maksimum. Fungsi utama APBD mencakup otorisasi, perencanaan, pengawasan, dan alokasi. Proses penyusunan APBD harus sesuai dengan hukum dan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan oleh eksekutif, pembahasan di DPRD, dan evaluasi dan pengesahan.

Siklus APBD Desa Bangun Galih

Proses pelaksanaan siklus APBD di Desa Bangun Galih dilakukan dengan berbagai tahapan seperti berikut:

Perencanaan APBDes

- Pembahasan RKPD dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- RKPD yang telah dibentuk akan menghasilkan RAPBDes: RAPBDes akan disesuaikan dan usulan warga desa dan terlebih terkait program kerja wajib yang diberikan pemerintah kabupaten/provinsi. RAPBDes juga sudah termasuk anggaran untuk SKPD pada bidang yang ada seperti bidang pemerintahan, bidang pembangunan
- Sosialisasi RAPBDes: RAPBDes serta aturan desa lainnya mengenai RAPBDes disosialisasikan kepada masyarakat melalui musyawarah dan penyebaran banner dan spanduk mengenai gambaran sementara alokasi anggaran dan perencanaan keuangan desa
- Penetapan bersama BPD: BPD atau Badan Permusyawaratan Desa akan ikut serta dalam menetapkan RAPBDes untuk menjadi suatu anggaran tetap dan bukan lagi sebuah rancangan

Pelaksanaan APBDes

- Rekening kas daerah: tempat pusat pengelolaan keuangan Desa Bangun Galih baik itu dana dari transfer pemerintahan pusat maupun dana pendapatan hasil usaha desa
- Sistem SISKUDes: Sistem milik Desa Bangun Galih yang digunakan untuk mengelola segala pengelolaan pendapatan seperti bukti transfer pajak maupun transfer pemerintah pusat.
- Kepala Urusan Keuangan Desa (Bendahara Desa): Pihak yang difungsikan dalam tugas pemungutan pendapatan baik pendapatan dari BUMDES dan pendapatan pajak
- Kewajiban Pengesahan RAPBDes: Pengesahan wajib dilakukan untuk melakukan pengeluaran kas, namun bisa juga menggunakan kas tanpa melakukan pengesahan RAPBDes yaitu dengan SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- Kegiatan Penyetoran: Penggunaan sistem CMS yang bersifat secara elektronik berupa kegiatan transfer dan penggunaan surat setoran pajak untuk transaksi secara tunai
- Pengelolaan Sisa Dana Anggaran: Disesuaikan dan dialokasikan sesuai dengan tujuan penganggaran tahun sebelumnya
- Penggunaan Dana Cadangan: Desa Bangun Galih menggunakan dana cadangan pada acara-acara penting desa seperti PILKADES dan PILKADA
- Investasi Desa: Investasi Desa Bangun Galih dilakukan pada BUMDes seperti pelaku UMKM dan pedang lainnya

Penatausahaan APBDes

- **Penerimaan:** semua sumber penerimaan desa, seperti dana transfer dan sumbangan, harus dicatat dengan benar. Kedua, setiap penerimaan yang diterima segera disetorkan ke rekening kas desa untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat. Ketiga, setelah melakukan setoran, Bendahara Desa akan menerima bukti setoran, seperti nota kredit dari bank, yang kemudian dicatat dalam buku kas desa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
- **Pengeluaran:** Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pemerintah desa dimulai dengan pemberian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada setiap bidang, yang sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBDes. Setiap Kepala Seksi, atau PKA, bertanggung jawab untuk mengelola anggaran di bidangnya. Ketika pengeluaran diperlukan, PKA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang mencantumkan rincian sesuai dengan anggaran APBDes yang telah disetujui. Setelah SPP disetujui selanjutnya dibuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan dana sesuai prosedur yang berlaku, dan semua bukti pembayaran akan dicatat serta didokumentasikan.

Pertanggungjawaban APBDes

Dalam skala desa pertanggungjawabannya melalui pemerintah daerah dalam bentuk surat terhadap masing-masing kegiatan dan diketahui oleh BPD. Surat pertanggung- jawaban dalam bentuk buku terkait anggaran dari kegiatan dan pengeluaran tersebut dilampiri dengan bukti pendukungnya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki kedudukan secara jelas dan dapat diawasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bentuk pertanggungjawaban ini biasanya berupa Peraturan Desa yang mencakup laporan tentang bagaimana pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah digunakan.

Laporan Pertanggungjawaban APBDes kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk dibahas dan disetujui melalui proses musyawarah desa melalui Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangun Galih, Kabupaten Tegal. Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi semakin penting bahwa APBDes bertanggung jawab. Studi kasus dan penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tentang pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi tahap awal dilakukan setelah pengesahan RAPBDes untuk memastikan bahwa rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring ketat terhadap penggunaan dana, efektivitas sistem pengelolaan seperti SISKUDes, serta kelancaran proyek pembangunan. Monitoring ini melibatkan pengawasan langsung oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan audit berkala oleh kepala desa serta perangkatnya. Setelah program berjalan, evaluasi pasca-kegiatan menjadi penting untuk mengukur dampak langsung terhadap masyarakat. Melalui survei, wawancara, dan analisis laporan pertanggungjawaban, efektivitas program dinilai, dan rekomendasi perbaikan dirumuskan. Rekomendasi ini fokus pada efisiensi alokasi anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi transparansi laporan untuk siklus anggaran berikutnya.

SIMPULAN

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Bangun Galih, Kabupaten Tegal, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses penyusunan APBD yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui badan permusyawaratan desa (BPD) tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang menjadi salah satu pilar dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim & Abdullah, 2016).

Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD di Desa Bangun Galih menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa program pembangunan infrastruktur, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan pembangunan daerah mengingat luasnya cakupan wilayah dan padatnya penduduk pada Desa Bangun Galih. Dalam melaksanakan keterlibatan antara pemerintah desa dengan para masyarakat, Desa Bangun Galih dinilai telah mampu memaksimalkan keikutsertaan para masyarakatnya dalam hal APBDes. Penelitian oleh Mardiasmo (2020) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi anggaran sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap siklus APBD perlu terus didorong.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Desa Bangun Galih harus mempertimbangkan keberlanjutan. Untuk memastikan bahwa program-program tersebut bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang, mereka harus dievaluasi secara berkala. Penelitian Sari et al. (2021) menemukan bahwa alokasi anggaran dan efektivitas implementasi dan pengawasan yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan.

SARAN

Secara keseluruhan, siklus APBD di Desa Bangun Galih dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan APBD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. N. (2022). *Salingdidik Ix 2022 Salingdidik Ix 2022*. 9(2018), 7– 12. <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/salingdidik/article/view/109/0>
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50– 63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>
- Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015). Analysis of Budgeting for Earning, Financial and Local Asset Management Department of Kotamobagu City Budget Year 2014. *Jurnal EMBA*, 3(1), 841– 848.
- Kusmila, Z., Carolina, C., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Alam, S. (2024). *Analisis penerapan akuntansi keuangan pada desa pondok siguang kecamatan danau kerinci barat kabupaten kerinci*. 17(2), 1855– 1862.
- Ningsih, P., Yudhia Wijaya, S., & Yetty, F. (2021). Aplikasi Sistem Akuntansi Desa Untuk Pelaporan Kekayaan Daerah Pada Desa Mandalawangi, Lebak Provinsi Banten. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 1227– 1233. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1176>
- Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam, A., & Selvia, E. (2020). BILANCIA/index ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND FROM THE ISLAM PERSPECTIVE (A CASE STUDY OF TABA PADANG REJANG VILLAGE HUKU PALIK DISTRICT NORTH BENGKULU REGENCY). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248– 261. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/>
- Rahmawati, R., Jumiati, I. E., & Harist, D. M. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Analysis of Village Financial

- Management in Tirem Village, Lebak Wangi Sub District, Serang Regency. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 79– 87. <https://doi.org/10.31506/jap.v8i1.3286>
- Rahmayanti, N. P. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Dd) Pada Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. *Al-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 11(2), 87. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v11i2.14189>
- Sari, F. H., Cahyadi, R., Asmi, N., Kamal, A., Jumliana, M., & Jami, S. (2024). *EDUKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Kantor Camat Kecamatan Camba)*. 3(1), 121– 127.
- Sari, H., Din, M., & Lamusa, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(2), 38– 47. <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/95>
- Selly, & Saputra, D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 32(2), 80– 90. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8303](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8303)